



DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi

## **BAB 1 - PENDAHULUAN**

a. Latar Belakang	3
b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
c. Wilayah Kerja KPKNL Lahat	9
d. Mandat yang Diberikan kepada KPKNL Lahat	10
e. Permasalahan Utama	11
f. Sistematika Laporan	12

## **BAB 2 - PERENCANAAN KINERJA**

a. Peran Strategis	15
b. Rencana Strategis	16
c. Peta Strategi Tahun Anggaran 2023	17
d. Kontrak Kinerja	18

## **BAB 3 - AKUNTABILITAS KINERJA**

a. Capaian Kinerja KPKNL Lahat	23
1. Target dan Realisasi Tahun 2024	23
2. Pencapaian KPKNL Lahat	26
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja	33
b. Realisasi Anggaran	47
c. Data dan Narasi Kinerja Lainnya	48

## **BAB 4 - PENUTUP**

a. Simpulan	51
b. Saran	53

## **LAMPIRAN**

55

# KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Pembaca yang terhormat,

Adalah menjadi kewajiban kami selaku instansi pemerintah untuk memberikan layanan profesional dan terbaik sesuai tugas kami di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Pelayanan Lelang. Sudah tentu, seluruh capaian kami dalam melaksanakan tugas harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya kepada para stakeholder.

Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis.

Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat telah menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun Anggaran 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban atas Capaian Kinerja KPKNL Lahat Tahun 2024. LAKIN KPKNL Lahat Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Balance Score Card (BSC) sebagai instrumen untuk mengukur kinerja KPKNL Lahat melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Kontrak Kinerja KPKNL Lahat Tahun 2024. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Lahat berdasarkan pengukuran capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 110,60% dari nilai maksimal 100%.

LAKIN KPKNL Lahat Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban KPKNL Lahat serta upaya meningkatkan kualitas layanan Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang untuk menjawab semakin tingginya harapan masyarakat atas kinerja dan pelayanan birokrasi.

Akhir kata, kepada seluruh pegawai KPKNL Lahat kami berikan apresiasi yang tinggi atas integritas, pelayanan, profesionalisme, sinergi dan semua upaya agar mencapai kesempurnaan dalam melaksanakan tugas. Tak lupa pula kami membuka diri atas segala saran dan kritik dari seluruh stakeholder sebagai salah satu upaya kami untuk memperbaiki layanan dan akuntabilitas kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Terima Kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Lahat, 20 Januari 2025  
Kepala Kantor

MUH. TAJUS SYARIFIN



# IKHTISAR EKSEKUTIF

---

Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat dalam mengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang disampaikan melalui Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Lahat Tahun 2024. LAKIN Tahun 2024 tersebut digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian visi DJKN selaku instansi vertikal yang membawahi KPKNL Lahat yaitu: **"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."**

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.



Laporan Kinerja KPKNL Lahat Tahun 2024 disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPKNL Lahat dalam meningkatkan kinerja. LAKIN KPKNL Lahat Tahun 2024 merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis DJKN 2020-2024.

LAKIN memiliki fungsi sebagai alat kontrol, alat pengukuran kinerja dan alat pemacu dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, sebagai organisasi yang terus berkembang, KPKNL Lahat sebagai ujung tombak kantor pelayanan di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara perlu memiliki kontrol yang baik dalam memantau kinerja yang menjadi tujuan organisasi.

Berdasarkan strategi-strategi yang termaktub dalam Rencana Strategis, KPKNL Lahat menyusun Kontrak Kinerja yang di dalamnya memuat Indikator Utama (IKU). IKU inilah yang kemudian menjadi alat kontrol kuantitatif dalam pengukuran berhasil atau tidaknya KPKNL Lahat dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan.

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Sepanjang tahun 2024, KPKNL Lahat telah menorehkan pencapaian yang dapat diukur secara kuantitatif melalui penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dihasilkan berdasarkan capaian IKU, yaitu sebagai berikut :

1. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sebesar 89,23%.
2. Indeks Integritas sebesar 103,67%.
3. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK sebesar 115,26%.
4. Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN sebesar 111,48%.
5. Persentase Realisasi Pokok Lelang sebesar sebesar 120%.
6. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara sebesar 120%.
7. Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian 120%.
8. Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan sebesar 100,16%.
9. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) sebesar 120%.
10. Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle sebesar 100%.
11. Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) sebesar 120%.
12. Persentase Produktivitas Lelang sebesar 120%.
13. Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian sebesar 120%.
14. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai sebesar 120%.
15. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko sebesar 114,49%.
16. Indeks Kinerja Anggaran (IKA) sebesar 120%.
17. Persentase Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN sebesar 120%.
18. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) sebesar 120%.
19. Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) sebesar 119,18%
20. Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM sebesar 105%.

**NKO KPKNL  
LAHAT T.A. 2024  
MENCAPAI  
110,60%,  
ADAPUN  
SEBAGAI  
PERBANDINGAN  
NKOTA. 2023  
115,76% DAN T.A.  
2021/2 (115,72%)**

Berdasarkan pencapaian tersebut di atas hasil penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Lahat Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 110,60 % dari nilai maksimal 100%.

Jika dibandingkan dengan NKO Tahun 2023 dan 2022 yaitu masing-masing sebesar 115,76% dan 115,72%, KPKNL Lahat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Ke depan, KPKNL Lahat akan bekerja lebih inovatif guna meningkatkan capaian-capaian strategis sehingga di masa yang akan datang diharapkan tidak saja optimal dan akuntabel (prinsip *Good Governance*) tetapi juga aplikatif dan inovatif.



**KPKNL**

**LAHAT**

*sewelo*



# MUH. TAJUS SYARIFIN

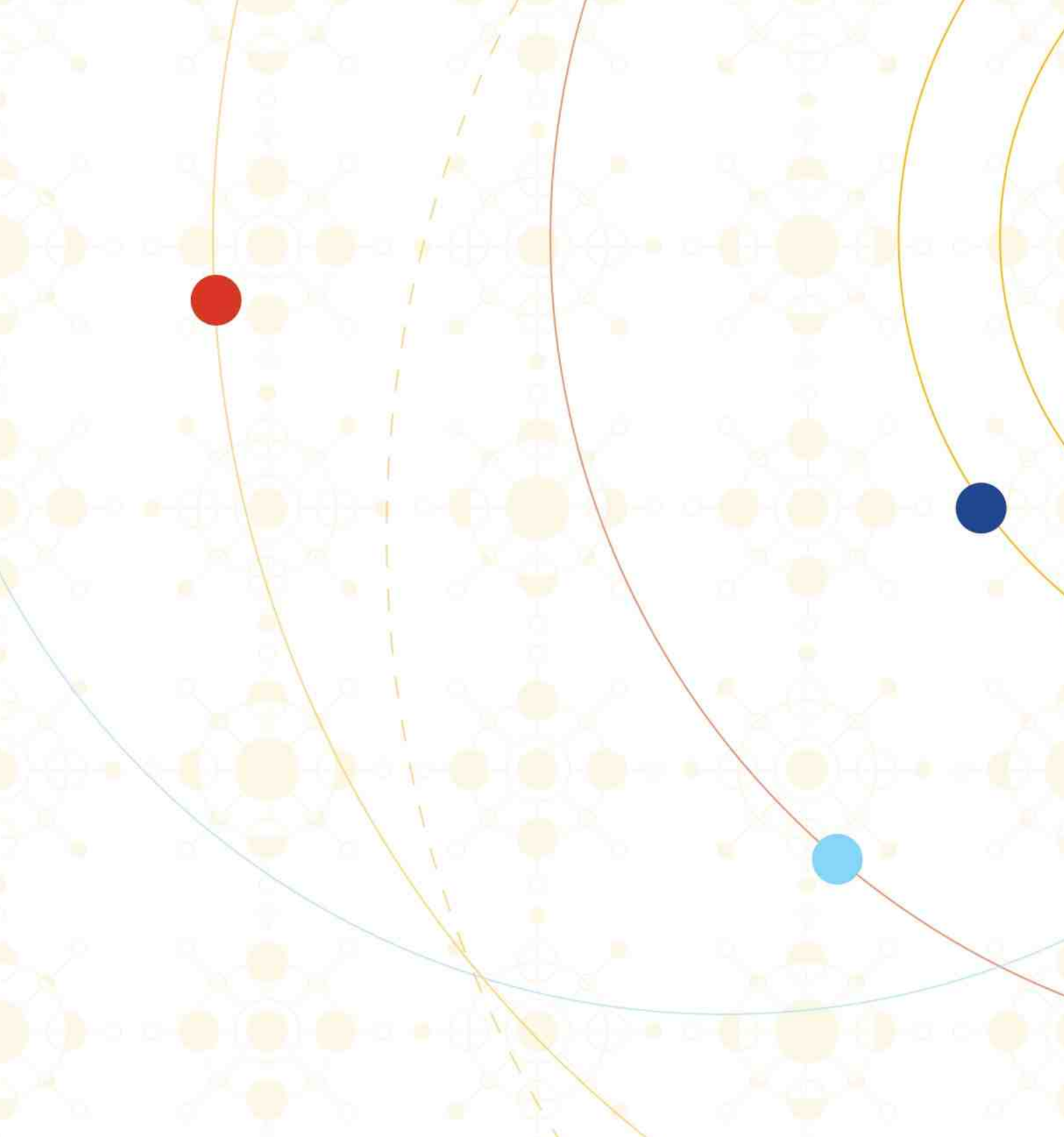
Kepala KPKNL Lahat





# PENDAHULUAN





**BAB I**

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, pelaporan kinerja yang dikenal sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah diubah menjadi Laporan Kinerja (LAKIN).

Penyusunan Laporan Kinerja adalah salah satu rangkaian dari SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dilakukan untuk mencapai akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Selain sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja juga merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja pada Tahun 2024, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 yang berisi rincian target dan kegiatan serta realisasi yang telah dicapai KPKNL Lahat dari bulan Januari hingga Desember Tahun 2024.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat adalah salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, yang mempunyai kewenangan melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara dan Lelang di wilayah kerja KPKNL Lahat. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Struktur organisasi KPKNL Lahat terdiri dari 1 (satu) jabatan struktural eselon III.a (Kepala Kantor) dan 5 (lima) eselon IV.a (Kepala Seksi/Kasubbag Umum) dan 5 (lima) pejabat fungsional.

## B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

## STRUKTUR ORGANISASI



### VISI

Dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada Kepala KPKNL Lahat, seluruh pegawai KPKNL Lahat telah sepakat untuk menjalankan visi DJKN yaitu:

**"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."**

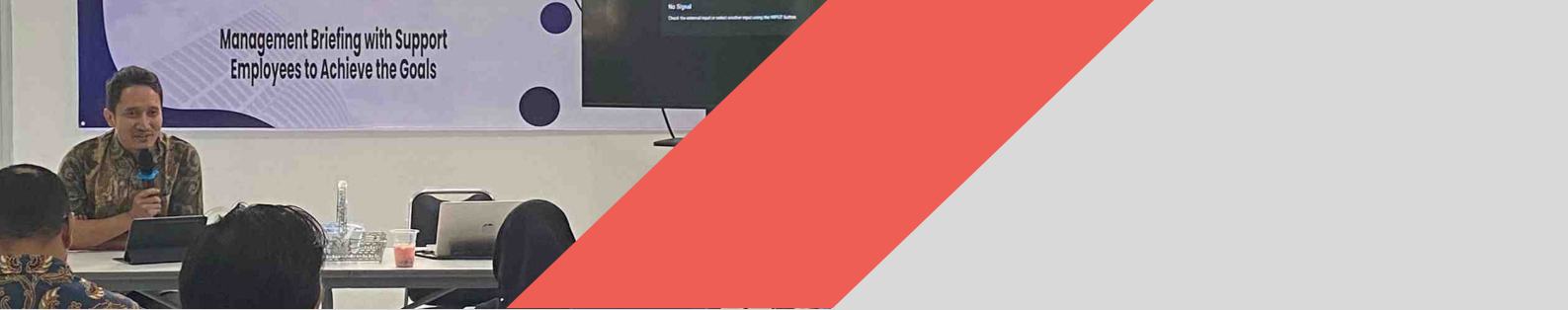
Visi dimaksud menjadi semangat sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran KPKNL Lahat dalam melaksanakan tugas. visi yang ditetapkan dapat diuraikan ke dalam frasa per frasa.

**Pengelola Kekayaan Negara** merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel.

**Profesional** adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan.

**Akuntabel** adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat** adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.



Adapun Pengelola Kekayaan Negara diharapkan dapat memiliki karakter kontributif, instrumental, otoritatif, berkelanjutan dan adaptif. Penjabaran lebih lanjut karakter tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Kontribusi** berarti bahwa hasil pengelolaan kekayaan negara dapat mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN serta andil dalam penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional;
- b. **Instrumental** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki peran penting dalam keuangan negara melalui peran konsultatif, implementatif dan pengawasan efektif dalam manajemen aset dan investasi;
- c. **Otoritatif** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara DJKN menjadi acuan yang paling berpengaruh dalam tataran teoritis maupun praktis yang dapat diadopsi dan direplikasi oleh manajer aset dan di level nasional dan internasional.
- d. **Berkelanjutan** diwujudkan melalui peningkatan tata kelola dan nilai tambah aset dan investasi pemerintah yang mengurangi eksposur APBN karena adanya kemandirian finansial dan risiko yang minimum;
- e. **Adaptif** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara mampu mengambil peluang dan responsif terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika kontemporer lainnya.

## MISI

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, KPKNL Lahat menetapkan Misi yang selaras dengan Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan mendukung Misi Kementerian Keuangan Nomor 4 (mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum) dan nomor 2 (mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif) melalui Misi sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
- Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

## TUJUAN

Tujuan merupakan bagian dari misi yang berupa penjabaran misi organisasi dan merupakan suatu hal yang ingin dicapai atau diperoleh dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun ke depan. Oleh karena itu, tujuan KPKNL Lahat memiliki korelasi dengan misi yang telah dinyatakan sebelumnya. Tujuan KPKNL Lahat adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
- Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
- Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
- Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif dan efisien.

**SASARAN** Sasaran merupakan penjabaran dan tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu bulanan, semesteran dan tahunan. Sasaran yang ingin dicapai oleh KPKNL Lahat dari tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

#### A. Pengelolaan Kekayaan Negara

- Terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan kekayaan negara;
- Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara yang tertib, tepat nilai, tepat guna dan tepat sasaran;
- Terselenggaranya informasi nilai terkini dan nilai potensial kekayaan negara yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### B. Piutang Negara

- Terwujudnya pengurusan piutang negara secara sehat dan bersih;
- Tercapainya target piutang negara yang dapat diselesaikan (PNDS);
- Terwujudnya pengelolaan dokumen asli barang jaminan.

#### C. Pelayanan Lelang

- Terselenggaranya pelayanan lelang bersih, transparan dan akuntabel;
- Tercapainya target hasil lelang baik dari pokok lelang maupun bea lelang.

#### D. Pelayanan Penilaian

- Penertiban BMN satker K/L tindak lanjut temuan BPK atas LKPP 2019 yang optimal;
- Administrasi Seksi Pelayanan Penilaian yang tertib;
- SDM Penilai yang handal;
- Pelayanan penilaian dalam rangka utilisasi BMN yang optimal;
- Pelayanan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara yang optimal;
- Tersedianya harga pasar yang wajar dalam rangka penyusunan DKPB.

#### E. Hukum dan Informasi

- Tercapainya peningkatan penatausahaan BKPN dan penyajian informasi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang;
- Tercapainya optimalisasi penanganan perkara.

#### F. Kepatuhan Internal

- Pelaksanaan SOP Unggul tepat waktu;
- Penyusunan kontrak kinerja yang tepat waktu dan mencerminkan capaian kinerja masing-masing pegawai dan organisasi;
- Mendefinisikan risiko yang mungkin terjadi beserta langkah-langkah pencegahan dan penanganan masalah;
- Memastikan kode etik dan peraturan disiplin pegawai yang berlaku dijalankan oleh seluruh pegawai;
- Memastikan hasil pemeriksaan aparat fungsional ditindaklanjuti;
- Laporan hasil pelaksanaan SOP Layanan Unggulan yang andal dan akurat



### G. Umum

- Terlaksananya pemberian dukungan teknis dan administrasi baik di Kantpr Wilayah maupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
- Pelaksanaan DIPA yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*
- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional kantor.

### FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Lahat menyelenggarakan fungsi di antaranya sebagai berikut:

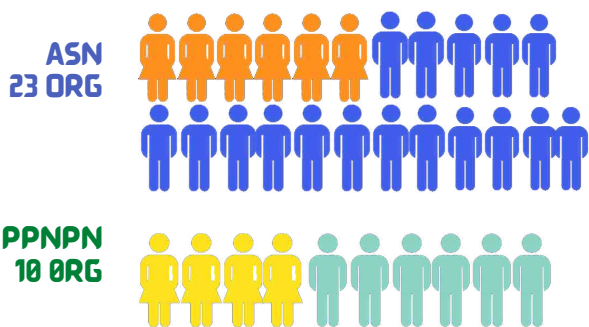
- Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- Penyajian bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyajian data usul penghapusan piutang negara;
- Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- Pelaksanaan pelayanan lelang;
- Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;
- Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
- Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
- Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.



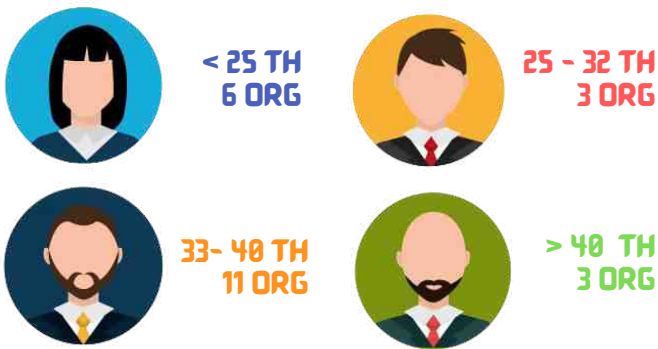
## KOMPOSISI PEGAWAI

Untuk menjalankan semua tugasnya, KPKNL Lahat memiliki 23 (dua puluh tiga) Pegawai ASN serta didukung oleh 10 (sepuluh) Pegawai PPNPN (honorar). Adapun komposisi pegawai ASN pada KPKNL Lahat dapat dipertakan berdasarkan golongan, pendidikan, usia dan kelompok fungsional.

### KOMPOSISI PEGAWAI ASN - PPNPN



### KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN USIA



### KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



## KOMPOSISI PEGAWAI

### KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN



### KOMPOSISI PEGAWAI KELOMPOK FUNGSIONAL KHUSUS



**C. WILAYAH KERJA KPKNL LAHAT**

KPKNL Lahat merupakan salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memiliki wilayah kerja yang luas meliputi 8 (delapan) kota dan/atau kabupaten. Adapun kota dan kabupaten yang termasuk wilayah kerja KPKNL Lahat adalah sebagai berikut:

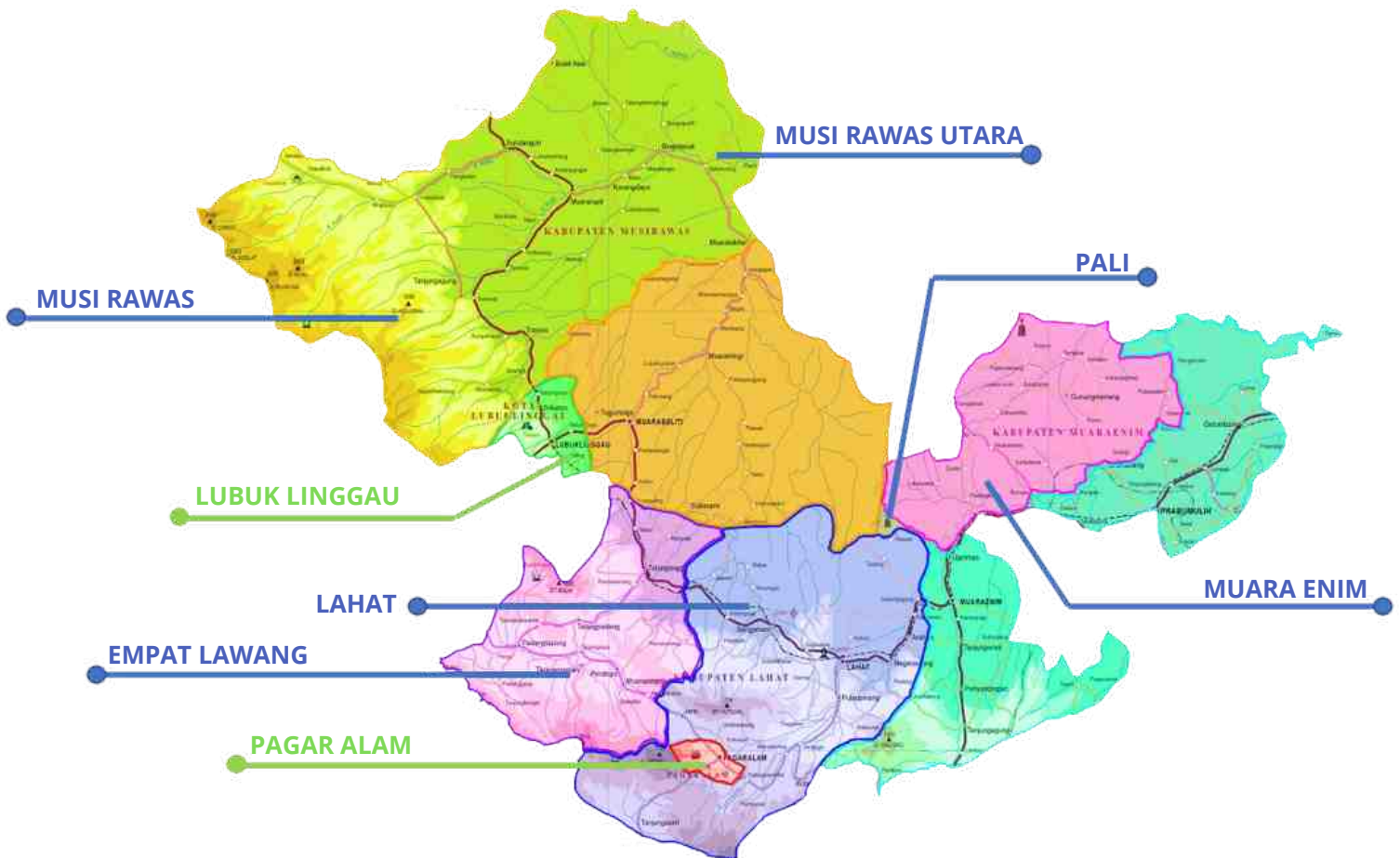


**2 KOTA**

LUBUK LINGGAU  
PAGAR ALAM

**6 KABUPATEN**

LAHAT  
MUARA ENIM  
MUSI RAWAS  
MUSI RAWAS UTARA  
EMPAT LAWANG  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)



#### D. MANDAT YANG DIBERIKAN KEPADA KPKNL LAHAT

KPKNL Lahat sebagai instansi vertikal DJKN yang diberi mandat untuk mengelola barang telah melakukan berbagai upaya yang maksimal untuk merapikan manajemen aset negara menuju terlaksananya tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik dalam pengelolaan kekayaan negara serta utilisasi aset negara yang optimal. Secara umum tugas dan fungsi KPKNL Lahat dikelompokkan dalam 2 (dua) tema pokok, yaitu:

- Tema **Kekayaan Negara** dengan tujuan mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan;
- Tema **Pendapatan Negara** dengan tujuan meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dengan mempertimbangkan ekonomi dan keadilan masyarakat.

#### STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan kedua tujuan tersebut di atas, terdapat strategi-strategi yang harus ditempuh, yaitu:

- Membuat usulan atas peraturan-perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang;
- Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, lelang dengan akurat dan akuntabel;
- Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik dan tertib hukum;
- Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- Meningkatkan penerimaan kembali (*recovery*) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan kemitraan dengan *stakeholder* dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Pengelolaan Anggaran;.

## E. PERMASALAHAN UTAMA

Transformasi Kelembagaan (TK) Kementerian Keuangan merupakan salah satu program lanjutan dari program reformasi birokrasi yang telah dicanangkan sejak tahun 2007 silam. TK Kementerian Keuangan bertujuan menjadikan Kementerian Keuangan sebagai organisasi yang bertaraf internasional yang memegang peranan penting dalam program pembangunan bangsa. Kementerian Keuangan sebagai institusi penting di negara ini memiliki peran-peran strategis yang berkaitan dengan perekonomian bangsa tentunya memerlukan perbaikan di semua instansi.

TK adalah wujud dari perubahan organisasi, model bisnis, sumber daya manusia, dan proses bisnis saat ini ke dalam bentuk yang berbeda yang mampu merespon perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan fungsi DJKN dari *asset manager* tentunya berdampak pada perluasan cakupan pengelolaan kekayaan negara yang menuntut tanggung jawab yang lebih besar. KPKNL Lahat sebagai institusi di bawah lingkungan DJKN pun memiliki tanggung jawab yang besar dalam tugas *special mission* untuk mengurus Piutang Negara, Penilaian dan Lelang. Hal tersebut membuat cakupan tugas KPKNL Lahat menjadi semakin berkembang di masa mendatang.

KPKNL Lahat sebagai satu institusi juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang baik sehingga hal ini mengharuskan KPKNL Lahat untuk terus mendukung dan melayani *stakeholder* lebih inovatif dan efisien.



Laporan Kinerja KPKNL Lahat tahun 2023 terdiri dari:

#### 1. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara umum KPKNL Lahat, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issues*) KPKNL Lahat.

#### 2. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun anggaran 2024.

#### 3. Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan hasil capaian kinerja, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan hasil capaian kinerja secara keseluruhan dengan beberapa tahun sebelumnya, pencapaian tahun ini dengan Rencana Strategis KPKNL Lahat 2019-2024 atau target jangka menengah, evaluasi dan analisa keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja termasuk program atau kegiatan penunjang atau tambahan. Disajikan pula realisasi anggaran untuk mencapai target sesuai dengan Kontrak Kinerja KPKNL Lahat.

#### 4. Penutup

Bagian penutup menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja KPKNL Lahat, kendala dan/atau hambatan yang dihadapi serta saran dan masukan yang dapat dilakukan oleh KPKNL Lahat di masa mendatang agar dapat terus meningkatkan kinerja.

#### 5. Lampiran

Lampiran menyajikan dokumen Kontrak Kinerja *Kemenkeu Three* dan perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Lahat tahun 2024 serta dokumen/hal lain yang dianggap perlu.





# BAB 2

# PERENCANAAN KINERJA



## A. PERAN STRATEGIS

KPKNL Lahat memiliki peran strategis organisasi dalam hal sebagai berikut:

### MANAJEMEN ASET NEGARA

KPKNL Lahat berperan mengoptimalkan pengelolaan aset negara/BMN, Optimalisasi tersebut dilakukan dengan upaya-upaya antara lain utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara sampai dengan tahap *asset disposal* serta didukung dengan penilaian untuk informasi nilai aset yang wajar sesuai dengan penggunaan tertinggi dan terbaik.

Selain itu KPKNL Lahat memiliki peran strategis dalam mendorong satuan kerja untuk mengamankan aset melalui program sertifikasi tanah BMN.

### PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

KPKNL Lahat bereperan dalam pengurusan Piutang Negara/daerah yang dilakukan melalui berbagai proses/tahapan penyelesaian Piutang Negara. Sejalan dengan kebijakan pengembalian Piutang Negara eks BUMN, KPKNL Lahat lebih fokus dalam menggali peluang penyelesaian Piutang Negara baik Pusat maupun daerah.

### PELAYANAN LELANG

KPKNL Lahat berperan dalam pelayanan lelang baik lelang eksekusi maupun lelang non eksekusi. Dengan keuntungan yang ditawarkan yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Diharapkan KPKNL dapat ikut berperan mendukung penyelesaian kredit macet melalui *disposal asset*.

Seiring dengan berjalannya perkembangan teknologi informasi maka metode penjualan barang melalui lelang juga turut berkembang, salah satunya implementasi penjualan lelang melalui internet (*e-auction*).

### PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

KPKNL Lahat memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam memberikan pelayanan pengurusan Piutang Negara, KPKNL Lahat memperoleh hasil berupa Biaya Administrasi (BIAD) Pengurusan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Lahat memperoleh hasil bea lelang termasuk bea lelang yang berasal dari lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

## B. RENCANA STRATEGIS

Pada tahun 2020, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-2915/KN.1/2020 Hal Penyampaian Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 Tanggal 09 September 2020 disampaikan bahwa para Kantor Wilayah DJKN dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), termasuk KPKNL Lahat untuk dapat mendukung mewujudkan Visi DJKN, Visi Kementereian Keuangan serta Visi Presiden dan Wakil Presiden dengan berpartisipasi aktif mendukung tercapainya Tujuan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana terdapat pada Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024 yang diamanatkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 Tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024.

## TUJUAN

Sejalan dengan Rencana Strategis DJKN dan misi yang diemban, KPKNL Lahat mempunyai tujuan pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Pengelolaan Kekayaan Negara;
2. Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara;
3. Optimalisasi pengelolaan aset kredit dan aset properti;
4. Peningkatan pelayanan penilaian;
5. Optimalisasi pengurusan Piutang Negara;
6. Peningkatan pelayanan lelang;
7. Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.

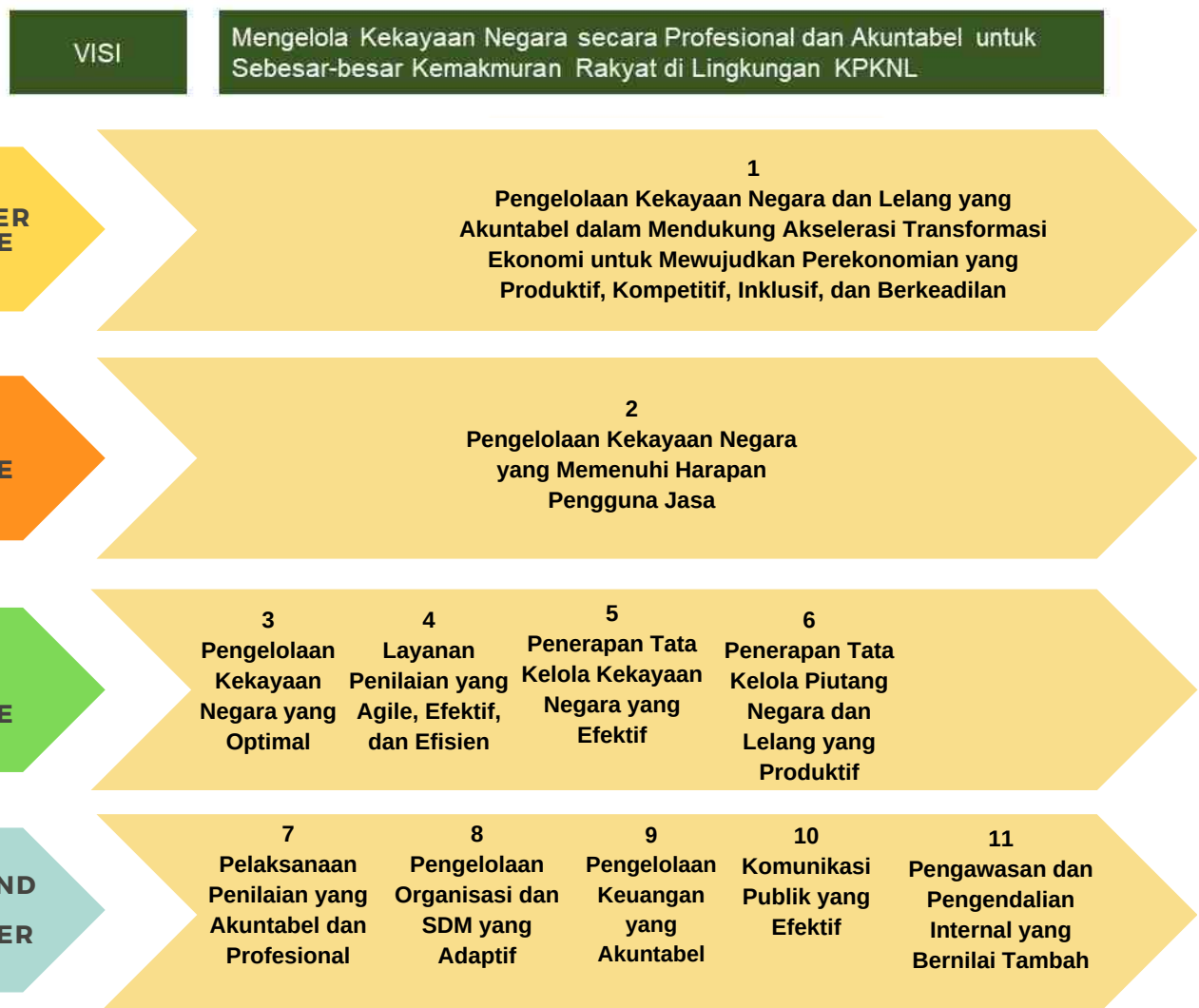


## SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut di atas, KPKNL Lahat menetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada tahun 2023 yaitu:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa
3. Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal
4. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien
5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif
7. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional
8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif
9. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
10. Komunikasi Publik yang Efektif
11. Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah

## C. PETA STRATEGI TAHUN ANGGARAN 2023



## D. KONTRAK KINERJA

Perjanjian/kontrak kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Bersamaan dengan telah ditetapkannya Peta Strategi, KPKNL Lahat memiliki perjanjian kinerja yang tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor PK-3/WKN.03/2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Indeks Integritas	89,17%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	71,50%
		2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,50%
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal	3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipkatkan	100%
		5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		5C-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	100%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	25%
		6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	89%

7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-N	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	8a-CP	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%
		8b-CP	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9a-CP	Indeks Kinerja Anggaran (IKA)	100
		9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%
10	Komunikasi Publik yang Efektif	10a-CP	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	11a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82
		11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%

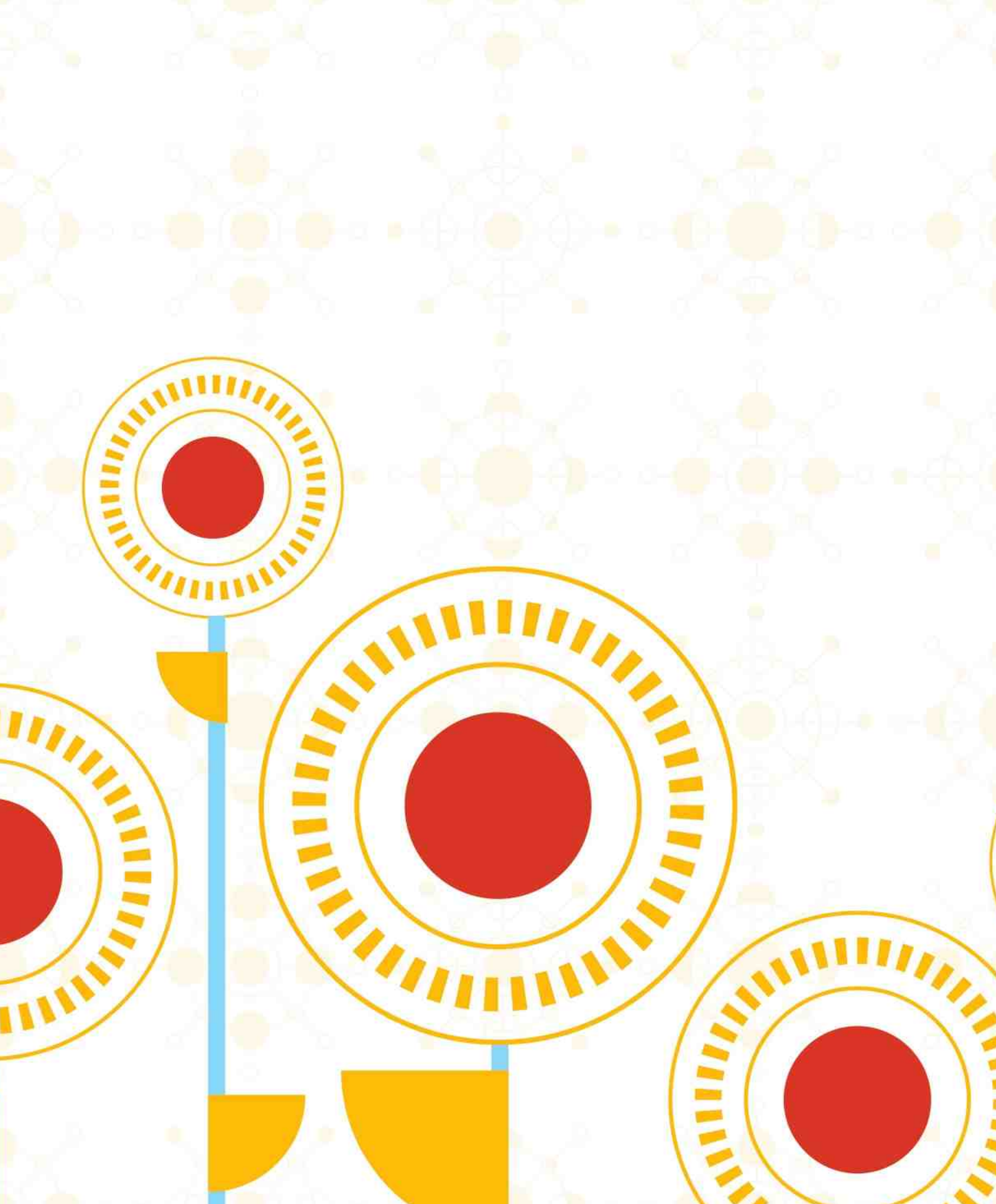
Berdasarkan *Strategy Map Kemenkeu-Three* KPKNL Tahun 2024, terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dengan 20 (dua puluh) Indikator Utama (IKU) yaitu :

1. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
2. Indeks Integritas
3. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK
4. Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN
5. Persentase Realisasi Pokok Lelang
6. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara
7. Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian
8. Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan
9. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)
10. Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle
11. Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)
12. Persentase Produktivitas Lelang
13. Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian
14. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai
15. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko
16. Indeks Kinerja Anggaran (IKA)
17. Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN
18. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)
19. Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)
20. Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM



# AKUNTABILITAS KINERJA





**BAB 3**



Pada Bab ini akan dipaparkan mengenai perbandingan antara target dan capaian kinerja KPKNL Lahat tahun 2024 yang dilengkapi dengan capaian kinerja tahun 2023, 2022, 2021 dan 2020 sebagai referensi capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Pada Bab ini juga akan dijelaskan mengenai hambatan dan evaluasi secara menyeluruh agar dapat menjadi masukan pada tahun berikutnya. Kemudian akan diuraikan juga mengenai alokasi dan sumber pembiayaan beserta relisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada tahun 2024.

Capaian kinerja organisasi diukur dengan membandingkan data antara target dan realisasi, yang disajikan dalam bentuk persentase. Capaian ini dapat menunjukkan seberapa jauh proses atau kemajuan yang telah didapat dalam periode waktu tertentu.

## A. CAPAIAN KINERJA KPKNL LAHAT

Secara ringkas target dan realisasi capaian keluaran (*output*) KPKNL Lahat pada tahun 2024 dapat dilihat pada formulir pengukuran kinerja berikut:

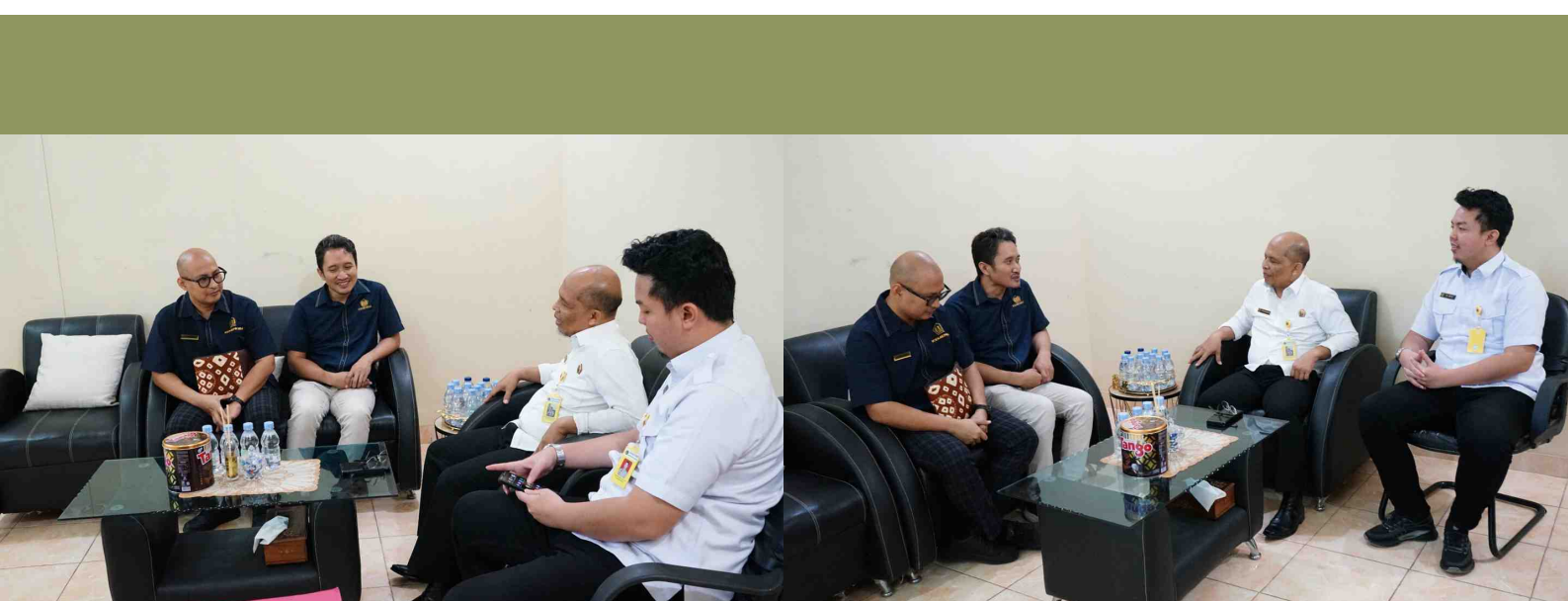
### 1. TARGET DAN PENCAPAIAN KPKNL LAHAT TAHUN 2024

<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan</b> <b>1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang</b>						
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	234,32%	112,40%	85,44%	89,23%	89,23%	
Capaian (Indeks)	234,32%	112,40%	85,44%	89,23%	89,23%	
Indeks 120	120%	112%	85,44%	89,23%	89,23%	
<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan</b> <b>1b-CP Indeks Integritas</b>						
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	10	20	30	89,17	89,17	Max/TLK
Realisasi	10	20	42	92,44	92,44	
Capaian (Indeks)	100%	100%	140%	103,67%	103,67%	
Indeks 120	100%	100%	120%	103,67%	103,67%	
<b>Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b> <b>2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK</b>						
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	30%	50%	60%	71,50%	71,50%	Max/TLK
Realisasi	67,94%	87,16%	83,43%	82,41%	82,41%	
Capaian (Indeks)	226,48%	174,32%	139,05%	115,26%	115,26%	
Indeks 120	120%	120%	120%	115,26%	115,26%	
<b>Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b> <b>2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN</b>						
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	10%	45%	60%	86,50%	86,50%	Max/TLK
Realisasi	75,00%	92,86%	92,86%	96,43%	96,43%	
Capaian (Indeks)	750%	206,35%	154,76%	111,48%	111,48%	
Indeks 120	120%	120%	120%	111,48%	111,48%	
<b>Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal</b> <b>3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang</b>						
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	198,92%	198,80%	128,11%	148,21%	148,21%	
Capaian (Indeks)	198,92%	198,80%	128,11%	148,21%	148,21%	
Indeks 120	120%	120%	120%	120%	120%	

Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal						
3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara						
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	124,65%	141,69%	92,42%	231,72%	231,72%	
Capaian (Indeks)	124,65%	141,69%	92,42%	231,72%	231,72%	
Indeks 120	120%	120%	92,42%	120%	120%	Max/TLK
Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien						
4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian						
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	100%	75	75	75	75	
Realisasi	102,50	101,96	105,90	106,82	106,82	
Capaian (Indeks)	137%	135,95%	141,20%	142,43%	142,43%	
Indeks 120	120%	120%	120%	120%	120%	Max/TLK
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif						
5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan						
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	20%	40%	60%	100%	100%	
Realisasi	20%	46,29%	90,73%	100,16%	100,16%	
Capaian (Indeks)	100%	115,73%	151,21%	100,16%	100,16%	
Indeks 120	100%	116%	120%	100,16%	100,16%	Max/TLK
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif						
5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)						
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	10%	32%	80%	100%	100%	
Realisasi	26%	53,71%	88,61%	126,70%	126,70%	
Capaian (Indeks)	263%	167,86%	110,76%	126,70%	126,70%	
Indeks 120	120%	120%	110,76%	120%	120%	Max/TLK
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif						
5c-N Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle						
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	25	55	88	100	100	
Realisasi	25	55	100	100	100	
Capaian (Indeks)	100%	100%	113,64%	100%	100%	
Indeks 120	100%	100%	113,64%	100%	100%	Max/TLK
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif						
6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)						
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	100%	75%	50%	25%	25%	
Realisasi	87,50%	62,50%	50%	0%	0%	
Capaian (Indeks)	113%	116,67%	100%	133,33%	133,33%	
Indeks 120	113%	117%	100%	120%	120%	Max/TLK
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif						
6b-CP Persentase Produktivitas Lelang						
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	30%	45%	60%	89%	89%	
Realisasi	61,57%	83,32%	107,69%	120%	120%	
Capaian (Indeks)	205%	185,16%	179,49%	134,83%	134,83%	
Indeks 120	120%	120%	120%	120%	120%	Max/TLK
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional						
7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian						
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	16%	16%	16%	16%	16%	
Realisasi	0%	0%	0%	0,01%	0,01%	
Capaian (Indeks)	200%	200%	200%	199,94%	199,94%	
Indeks 120	120%	120%	120%	120%	120%	Max/TLK
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif						
8a-CP Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai						
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	45%	60%	80%	90%	90%	
Realisasi	69,64%	99,91%	116%	119%	119%	
Capaian (Indeks)	155%	166,52%	145%	132,22%	132,22%	
Indeks 120	120%	120%	120%	120%	120%	Max/TLK



Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif						
8b-CP Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko						
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	85	85	85	85	85	Max/TLK
Realisasi	100	98	98	97,32	97,32	
Capaian (Indeks)	118%	115,75%	114,83%	114,49%	114,49%	
Indeks 120	118%	116%	114,83%	114,49%	114,49%	
Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel						
9a-CP Indeks Kinerja Anggaran (IKA)						
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	96,99	106,94	104,86	120	120	
Capaian (Indeks)	97%	106,94%	104,86%	120%	120%	
Indeks 120	97%	107%	104,86%	120%	120%	
Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel						
9b-CP Persentase Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN						
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	10%	10%	10%	10%	10%	Max/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian (Indeks)	200%	200%	200%	200%	200%	
Indeks 120	120%	120%	120%	120%	120%	
Komunikasi Publik yang Efektif						
10a-CP Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)						
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	103,48	100	100	100	100	
Capaian (Indeks)	129%	125%	125%	125%	125%	
Indeks 120	120%	120%	120%	120%	120%	
Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah						
11a-N Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)						
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	5	15	20	82	82	Max/TLK
Realisasi	5	15	20	97,73	97,73	
Capaian (Indeks)	100%	60%	60%	119,18%	119,18%	
Indeks 120	100%	100%	100%	119,18%	119,18%	
Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah						
11b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-VBK/VBBM						
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	100%	100%	100%	105%	105%	
Capaian (Indeks)	100%	100%	100%	105%	105%	
Indeks 120	100%	100%	100%	105%	105%	



Sebagai perbandingan, agar dapat mengukur performa kinerja KPKNL Lahat, kami sajikan capaian KPKNL Lahat pada tahun 2023, 2022, 2021, 2020. Rincian indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilengkapi target pada tahun sebelumnya tentu tidak sama persis dengan IKU di tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh tantangan global dan evaluasi secara menyeluruh, sehingga dilakukan perbaikan-perbaikan melalui rencana strategis untuk mencapai kesempurnaan pencapaian visi dan misi DJKN khususnya KPKNL Lahat. Adapun target dan capaian kinerja KPKNL Lahat pada tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

## 2. PENCAPAIAN KPKNL LAHAT TAHUN SEBELUMNYA

### Target dan Capaian Kinerja KPKNL Lahat Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	%
<b>Stakeholder Perspective</b>					
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang			130,32%
		a. PNBPN Pengelolaan BMN	Rp2.920.400.000	Rp3.056.485.438	
		b. PNBPN Piutang Negara	Rp300.000	Rp555,512	
		c. PNBPN Lelang	Rp1.500.000.000	Rp2.704.231.298	
		Persentase Produktivitas Lelang			45,01%
		Jumlah Lot lelang Laku Secara keseluruhan		344	
		Jumlah Lot lelang TAP Secara keseluruhan		366	
		Jumlah Lot lelang Wanprestasi Secara Keseluruhan		19	
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2023)	Rp156.000.000	Rp172.000.000	110,26%	
<b>Customer Perspective</b>					
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang			180,28%
		Pokok Lelang Kelas I	Rp25.500.000.000	Rp57.050.057.766	
		Pokok Lelang Pegadaian	Rp10.000.000.000	Rp20.098.115.600	
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2023)	Rp156.000.000	Rp172.000.000	110,26%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		90,52	90,52%

### Internal Process Perspective

4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK			86,19%
		a. Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2023)		87,83%	
		b. Monev Tingkat Kesesuaian SBSK Th 2022		81,26%	
		Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	48	74	154,17%
		Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	3	5	166,67%
		Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)			123,01%
		1.Target/Realisasi Evaluasi Kinerja BMN	74	90	
		2.Target/Realisasi Penyusunan dan Pencapaian Rekomendasi	7	9	
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	0%	0%
6	Pelaksanaan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction			100%
		Jumlah Realisasi Frekuensi e-Auction		389	
		Jumlah Realisasi Frekuensi e-Conventional Auction		-	
		Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang		389	100%
7	Edukasi yang Efektif	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	90,50	92,18	92,18
		Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara			95%
8	Pengawasan Pengendalian yang Efektif	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode Semester II 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L		18	
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2023 yang ditindaklanjuti oleh K/L		17	
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2022		20	
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2023		17	
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>					
9	SDM yang Kompeten	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai		100%	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	80	91,19	91,19
11	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	93,29%	93,29%
		Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	267,00%	267,00%

## Target dan Capaian Kinerja KPKNL Lahat Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	%
<b>Stakeholder Perspective</b>					
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang			120,86%
		a. PNBP Pengelolaan BMN	Rp2.142.000.000	Rp2.696.279.981	
		b. PNBP Piutang Negara	Rp564.000	Rp829.409	
		c. PNBP Lelang	Rp1.300.000.000	Rp1.463.779.683	
		Persentase Produktivitas Lelang			65,38%
		Jumlah Lot lelang Laku Secara keseluruhan		414	
		Jumlah Lot lelang TAP Secara keseluruhan		233	
		Jumlah Lot lelang Wanprestasi Secara Keseluruhan		26	
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2023)	Rp160.650.135	Rp211.704.729	131,78%
<b>Customer Perspective</b>					
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang			154,66%
		Pokok Lelang Kelas I	Rp23.000.000.000	Rp28.733.273.256	
		Pokok Lelang Pegadaian	Rp8.000.000.000	Rp19.212.815.300	
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2023)	Rp160.650.135	Rp211.704.729	131,78%
3	Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna LayananKPKNL	4,60	4,65	4,65%



Internal Process Perspective					
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK			85,09%
		a. Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2022)			83,01%
		b. Monev Tingkat Kesesuaian SBSK Th 2021			91,33%
		Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	34	76	223,53%
		Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	3	8	266,67%
		Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)			121,14%
		1.Target/Realisasi Evaluasi Kinerja BMN	50	64	
		2.Target/Realisasi Penyusunan dan Pencapaian Rekomendasi	98	112	
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	0%	0%
6	Pelaksanaan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction			100%
		Jumlah Realisasi Frekuensi e-Auction		304	
		Jumlah Realisasi Frekuensi e-Conventional Auction		-	
		Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang		304	100%
7	Pengawasan Pengendalian yang Efektif	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara			100%
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode Semester II 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L		12	
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L		16	
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2021		12	
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2022		16	



Learning & Growth Perspective					
8	SDM yang Kompeten	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai		100%	100%
9	Organisasi yang Fit For Purpose	Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK/WBBM	75	93,32	93,32
		Nilai hasil review pengelolaan kinerja	80	96,96	124,43
		Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	95,10	121,20%
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,50%	99,09%	105,66%
		Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	103,76%	103,76%





### Capaian Kinerja KPKNL Lahat Tahun 2020 s.d. 2024

Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase Hasil Pokok Lelang	160,23%	97,45%	154,66%	217,32%	148,21%
Presentase Implementasi E-Auction	111,11%	108,70%	108,70%	100,00%	100,00%
Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	104,98%	103,87%	103,76%	93,29%	96,76%

**Catatan:**

Indikator Utama yang dibandingkan hanyalah indikator utama yang terdapat pada setiap tahunnya agar dapat dilakukan perbandingan.





### 3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) IKU KPKNL Lahat Tahun 2023 hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama DJKN Tahun 2024 sebagai berikut:

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila dapat mewujudkan APBN yang efektif dan efisien. Upaya untuk mewujudkan Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik dan tertib administrasi. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPKNL Lahat mengidentifikasi 2(dua) IKU yaitu:

- Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
- Indeks Integritas

Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, adalah Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara yang bersumber dari barang milik negara dan hasil pengurusan piutang negara serta Penerimaan Hasil lelang direpresentasikan oleh PNBP dari lelang. Jumlah Penerimaan Negara yang dicapai oleh KPKNL Lahat pada tahun 2024 adalah sebesar Rp5.179.386.301,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.804.837.298,00 atau dalam persentase sebesar 89,23% dari target 100%.

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Indeks integritas yang dicapai oleh KPKNL Lahat pada tahun 2023 adalah sebesar 92,44 dari target yang ditetapkan sebesar 88,67 atau dalam persentase sebesar 103,67% dari target 100%.

#### Sasaran Strategis I

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan



Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa ialah pelayanan terkait pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang diselesaikan dengan tepat waktu dan menghasilkan output yang diinginkan oleh stakeholder maupun pihak internal. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPKNL Lahat mengidentifikasi 2 (dua) IKU yaitu Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dan Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN.

- [Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK](#)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang efektif memerlukan kesesuaian antara kebutuhan instansi dan kondisi aset yang dimiliki. Salah satu indikator utama dalam menilai efisiensi tersebut adalah tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). SBSK menjadi acuan utama dalam menetapkan jenis, jumlah, dan spesifikasi barang yang sesuai untuk mendukung operasional pemerintah. Dengan mematuhi SBSK, instansi dapat memastikan penggunaan BMN yang tepat guna, efisien, dan mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Di KPKNL Lahat, upaya untuk meningkatkan kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK terus dilakukan melalui evaluasi rutin dan koordinasi dengan unit kerja terkait. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap kebutuhan aktual, optimalisasi pemanfaatan BMN yang ada, serta perencanaan pengadaan yang berbasis data. Selain itu, pengawasan secara berkala juga dilaksanakan untuk memastikan bahwa BMN digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan pemborosan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, sekaligus mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih baik.

## Sasaran Strategis II

### Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa



- **Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN**

Efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan bahwa keputusan terkait pengelolaan aset negara dapat segera diimplementasikan. Persetujuan pengelolaan mencakup berbagai kegiatan, seperti penghapusan, pemanfaatan, dan hibah BMN, yang memerlukan koordinasi lintas unit dan pemangku kepentingan. Tingkat efektivitas dapat diukur melalui kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut, mulai dari penetapan kebijakan hingga penyelesaian dokumen administratif dan operasional. Dengan tindak lanjut yang efektif, BMN dapat dimanfaatkan secara optimal, mendukung efisiensi anggaran, dan meminimalkan risiko idle asset.

Di KPKNL Lahat, efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN diupayakan melalui penyederhanaan proses administrasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Mekanisme pelaporan progres tindak lanjut secara berkala juga diterapkan untuk memantau hambatan yang dihadapi dan mencari solusi secara proaktif. Selain itu, penggunaan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Manajemen BMN memungkinkan pengawasan dan pengelolaan yang lebih terintegrasi. Dengan langkah-langkah ini, KPKNL Lahat berkomitmen untuk memastikan bahwa pengelolaan BMN berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memberikan dampak nyata bagi kepentingan negara dan masyarakat.

- **Persentase realisasi pokok lelang**

Pelaksanaan lelang yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan didahului dengan adanya pengumuman lelang dapat menghasilkan lelang yang kompetitif dan hasilnya maksimal. Hasil lelang yang optimal dapat teridentifikasi dari adanya peminat lelang dan terjualnya barang yang dilelang minimal sesuai dengan harga dasar/limit lelang. Dari pelaksanaan lelang tersebut dipungut bea lelang pembeli dan penjual yang masing-masing kategori lelang memiliki besaran persentase bea lelang sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan

**Sasaran  
Strategis III**

**Pengelolaan  
Piutang  
Negara dan  
Lelang yang  
Optimal**

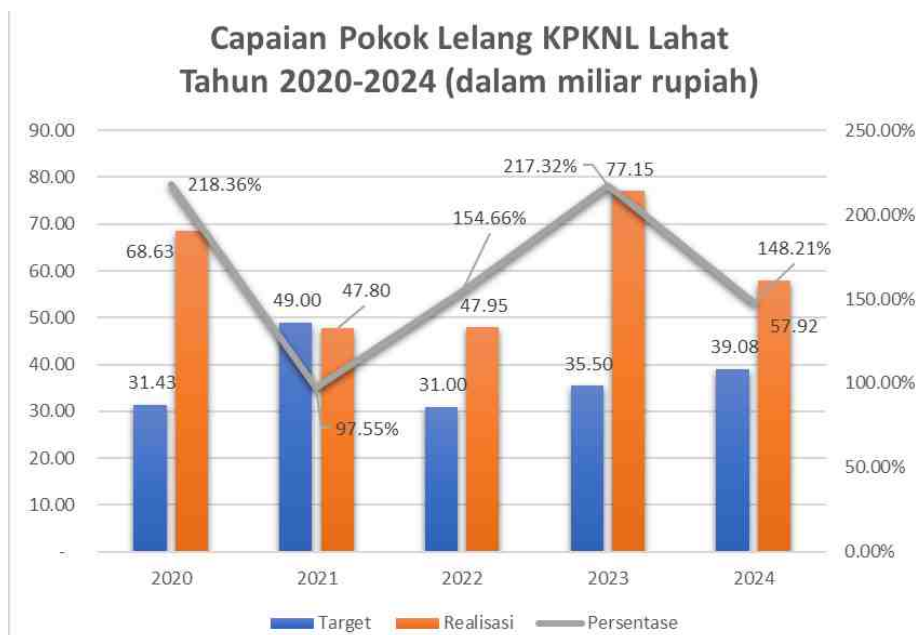


Nomor 27/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah menjadi PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. KPKNL Lahat mengidentifikasi 1 (satu) IKU guna mencapai sasaran strategis dimaksud yaitu Persentase Realisasi Pokok Lelang.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Pokok Lelang adalah harga lelang yang belum termasuk Bea Lelang Pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurang Bea Lelang Pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II dalam periode tertentu.

Jumlah pokok lelang yang dicapai oleh KPKNL Lahat pada tahun 2024 adalah sebesar Rp57.919.093.357,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp39.079.801.623,00 atau dalam persentase sebesar 148,21% dari target 100%.

Capaian Pokok Lelang KPKNL Lahat Tahun 2020-2024





- [Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara \(Saldo PNDS s.d. 2023\).](#)

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara terhadap BKPN lama.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan;
6. Koreksi Data (perbaikan pencatatan/nilai) Adapun target IKU ini sebesar 100%.

#### [Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian](#)

Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian merupakan indikator kinerja utama yang menggambarkan kemampuan KPKNL dalam menyelesaikan layanan penilaian secara tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Penilaian yang tepat waktu menjadi elemen penting dalam mendukung pengelolaan aset negara, baik untuk kepentingan penghapusan, pemanfaatan, pengadaan, maupun kebutuhan administrasi lainnya. Tingkat ketepatan waktu ini tidak hanya mencerminkan profesionalisme dan efisiensi kerja, tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi dan kepuasan pengguna layanan.

Di KPKNL Lahat, upaya untuk meningkatkan indeks ini dilakukan melalui penguatan proses bisnis, pengendalian mutu, serta koordinasi yang efektif antara penilai dengan pengguna layanan. Setiap permohonan penilaian diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi dan kompleksitas kasus, didukung oleh sistem pencatatan dan pemantauan berbasis teknologi. Dengan memastikan keterpaduan alur kerja, penyelesaian layanan penilaian dapat dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Peningkatan indeks ini tidak hanya menjadi bukti keberhasilan dalam memberikan pelayanan prima, tetapi juga menjadi kontribusi nyata KPKNL Lahat dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

**Sasaran  
Strategis IV**

**Layanan  
Penilaian  
yang Agile,  
Efektif, dan  
Efisien**



## Sasaran Strategis V

### Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle)
- 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBP (revenue generating).
- 3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.
- 5) Aset tertib administrasi, fisik dan hukum
- 6) Piutang negara terselesaikan dengan optimal

Untuk mewujudkan tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang efektif, KPKNL Lahat mengidentifikasi 3 (tiga) IKU antara lain:

- **Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan**

Target persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan pada tahun 2023 sebesar 1240 (100%) dan telah terealisasi sebesar 1242(100,16%) dari target. Upaya ini untuk mendukung pelaksanaan Program Pemerintah terkait sertifikasi tanah BMN sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

- **Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)**

Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan indikator yang mengukur sejauh mana pengelolaan aset negara telah dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan optimalisasi pemanfaatannya. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap aspek administratif, fisik, dan nilai ekonomis BMN, serta tingkat kesesuaian penggunaannya dengan kebutuhan organisasi. Di KPKNL Lahat, proses evaluasi kinerja portofolio aset dilakukan secara berkala dengan pendekatan berbasis data yang melibatkan pengumpulan, verifikasi, dan analisis informasi terkait aset. Hasil evaluasi ini tidak hanya berfungsi untuk memetakan kondisi aset secara akurat, tetapi juga untuk mengidentifikasi potensi peningkatan nilai dan efisiensi dalam pengelolaannya. Dengan demikian, persentase evaluasi yang tinggi mencerminkan komitmen KPKNL Lahat dalam memastikan BMN dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat.



- Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle

Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle merupakan indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mendata dan mengidentifikasi Barang Milik Negara (BMN) yang tidak digunakan atau belum dimanfaatkan secara optimal. Inventarisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aset idle tercatat dengan akurat dan dapat dikelola lebih lanjut, baik melalui optimalisasi pemanfaatan, penghapusan, maupun alih fungsi sesuai kebutuhan. Di KPKNL Lahat, pelaksanaan inventarisasi dilakukan secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan mekanisme koordinasi antarunit kerja. Data yang diperoleh dari inventarisasi menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi strategis untuk mengurangi jumlah aset idle dan meningkatkan efisiensi pengelolaan BMN. Tingginya indeks ini mencerminkan keseriusan KPKNL Lahat dalam mengelola aset negara secara efektif, mendukung efisiensi anggaran, dan memaksimalkan kontribusi aset terhadap pembangunan.



## Sasaran Strategis V

### Pelaksanaan Penilaian Yang Akuntabel dan Profesional

.....

- **Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)**

Berkas Kasus Pengurusan Piutang Negara (BKPN) merupakan berkas yang berisi dokumen bukti tahapan pengurusan Piutang Negara dan diberi nomor/kode register BKPN sesuai dengan tahun penyerahan Piutang Negara kepada PUPN/DJKN. Jumlah BKPN yang dapat diselesaikan merupakan jumlah BKPN yang dihentikan/selesai tahapan pengurusan piutangnya dikarenakan BKPN tersebut lunas, BKPN ditarik oleh penyerah piutang untuk dilakukan restrukturisasi, BKPN ditetapkan sebagai Piutang Negara Belum Dapat Diselesaikan (PSBDT) atau BKPN dikembalikan kepada penyerah piutang.

Jumlah BKPN yang dapat diselesaikan (lunas, penarikan, PSBDT, pengembalian) oleh KPKNL Lahat pada tahun 2024 adalah sebanyak 8 debitur dari target 2 debitur.

- **Persentase Produktivitas Lelang**

IKU untuk Persentase Produktivitas Lelang terdiri atas penggabungan target persentase jumlah frekuensi lelang yaitu seberapa banyak pelaksanaan lelang selama tahun 2024 serta target jumlah frekuensi lelang yang laku dan Jumlah Realisasi Lot Laku Lelang. Target Nilai Produktivitas lelang pada tahun 2024 adalah sebesar 89% dengan realisasi sebesar 130,98%, dengan capaian akhirnya sebesar 120%.



## Sasaran Strategis VII

### Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Penyelesaian Tugas di Bidang Penilaian adalah penyelesaian tugas bagi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah berupa melaksanakan kegiatan di bidang properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan MenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2021 yang selanjutnya dijelaskan dalam petunjuk pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK.06/2021.

Tugas di Bidang Penilaian bagi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintahan meliputi butir-butir kegiatan baik yang termasuk dalam unsur utama (Pelatihan, penilaian di bidang properti/bisnis, pengembangan profesi), maupun unsur penunjang, dengan batasan setiap unsurnya adalah minimal unsur utama 80% AKK dari yang ditarget dan maksimal 20% AKK dari yang ditargetkan.

Butir-butir kegiatan dimaksud mempunyai nilai angka kredit yang harus dikumpulkan oleh Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah sesuai dengan target tahunan yang ditetapkan. Untuk mewujudkan tata kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang efektif, KPKNL Lahat mengidentifikasi 1 (satu) IKU yaitu:

- **Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian**

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. apabila nilai hasil penyesuaian lebih rendah dari nilai pada persetujuan namun masih di bawah nilai wajar hasil penilaian tim penilai, maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. mempertimbangkan profesionalisme dan integritas penilai, terdapat pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa. Dapat dihitung deviasi apabila terdapat bukti bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh pengelola barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti (pemanfaatan/penjualan). Dalam hal dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 50%, dan dalam hal tidak dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 0% Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Adapun realiasi deviasi ketergunaan hasil penilaian pada tahun 2024 sebesar 0,01% dari target tahun 2024 sebesar 16%.



## Sasaran Strategis VIII

### Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPKNL Lahat mengidentifikasi 2 (dua) IKU yaitu:

- [Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai](#)

Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai mengukur sejauh mana pegawai di KPKNL Lahat telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan kemampuan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Indikator ini mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai aset utama dalam menjalankan tugas dan fungsi institusi. Program pengembangan kompetensi mencakup berbagai aspek, seperti keahlian teknis, kepemimpinan, dan soft skills, yang dirancang untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.

Di KPKNL Lahat, pengembangan kompetensi pegawai dilaksanakan melalui pendekatan yang terencana dan berbasis data, termasuk analisis kebutuhan pelatihan (training need analysis). Setiap pegawai diupayakan untuk mendapatkan kesempatan yang adil dalam mengikuti pelatihan, baik secara internal maupun eksternal, guna memastikan peningkatan kompetensi berjalan secara merata. Persentase yang tinggi pada indikator ini menunjukkan keberhasilan KPKNL Lahat dalam membangun SDM yang unggul, adaptif, dan siap menghadapi tantangan pelayanan publik yang terus berkembang.

- [Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko](#)

Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko merupakan ukuran keberhasilan dalam mengintegrasikan pengelolaan kinerja organisasi dengan pengelolaan risiko yang efektif. Indikator ini mencerminkan sejauh mana KPKNL Lahat mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi pencapaian tujuan yang sejalan dengan mitigasi risiko yang mungkin muncul. Pengelolaan kinerja dilakukan dengan menetapkan target yang jelas, terukur, dan realistis, sementara pengelolaan risiko mencakup identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko yang dapat memengaruhi pencapaian target tersebut. Dengan pendekatan yang terstruktur, indeks ini memberikan gambaran tentang tingkat akuntabilitas dan ketahanan organisasi dalam menghadapi dinamika operasional. Tingginya indeks ini mencerminkan komitmen KPKNL Lahat terhadap peningkatan kualitas manajemen yang berbasis data dan risiko, guna mendukung pencapaian tujuan strategis secara optimal dan berkelanjutan.



Pengelolaan keuangan yang akuntabel dilakukan untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam penggunaan sumber daya keuangan negara. Tujuannya adalah untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal, memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat, dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Dengan pengelolaan yang akuntabel, setiap proses keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip *good governance*. Hal ini juga mendukung peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi, memastikan alokasi dana yang tepat sasaran, serta mendukung terciptanya tata kelola keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan.

## Sasaran Strategis IX

### Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

KPKNL Lahat mengidentifikasi 2 (dua) IKU yaitu Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara.

- **Indeks Kinerja Anggaran (IKA)**

Target IKA tahun 2024 adalah 100, realisasi selama tahun 2024 adalah 120 atau 120% dari target yang telah ditetapkan.

Implementasi kualitas pelaksanaan anggaran dapat diukur dari 4 (empat) komponen yaitu:

- Penyerapan anggaran atas pagu neto adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-KL dan DIPA, tidak termasuk *softblocking*, hasil efisiensi, dana lainnya yang penggunaannya bersifat khusus (kontijensi).
- Keluaran riil adalah barang/jasa sebagai hasil akhir setiap/serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh unit/satker pada satu tahun anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana belanja barang dan belanja modal, meliputi objek: perjalanan dinas, rapat dalam kantor, konsinyering/paket *meeting*, kudapan/makan siang rapat, langganan daya dan jasa, honorarium tim, honorarium, narasumber, moderator, kepanitiaan lainnya, kecuali untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai yang diselenggarakan oleh BPPK, proses pengadaan barang/jasa, belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja barang operasional/non operasional lainnya. Hasil lebih atau sisa dana dihitung sebagai efisiensi apabila capaian keluaran riil paling sedikit seratus persen (100%).
- Konsistensi adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan belanja modal dengan rencana penarikan dana (RPD) bulanan belanja barang dan modal sesuai: lembar ketiga DIPA atau RPD revisi pertama, atau RPD revisi pertama setelah APBN-P, atau RPD revisi pertama setelah penetapan kebijakan *selfblocking*.

Capaian kinerja diperhitungkan sesuai dengan ketentuan SE-35/MK.1/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.



Antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan pengeluaran riil tiap bulannya seringkali tidak sesuai sehingga berdampak pada capaian akhir dari target kualitas pelaksanaan anggaran.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk pencapaian target IKU ini antara lain membuat prognosa rencana kerja tiap-tiap seksi dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk mencapai kesesuaian antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Realisasi Anggaran, sehingga berdampak pada capaian akhir dari target kualitas pelaksanaan anggaran menjadi baik.

**LAPORAN CAPAIAN  
IKU INDEKS KINERJA ANGGARAN  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LAHAT  
S.D. TRIWULAN IV 2024**

**A. Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran s.d. Triwulan IV TA 2024**

Indikator IKU Indeks Kinerja Anggaran	Capaian s.d. Triwulan IV
<b>A. Nilai IKPA</b>	<b>96,76%</b>
1 Revisi DIPA	100,00%
2 Deviasi Halaman III DIPA	92,99%
3 Belanja Kontraktual	100,00%
4 Pengelolaan UP dan TUP	99,51%
5 Penyerapan anggaran	89,32%
6 Penyelesaian Tagihan	100,00%
7 Capaian Output	100,00%
8 Dispensasi SPM (Pengurang)	0,00%
<b>B. Nilai SMART</b>	<b>98,38%</b>
<b>Nilai Capaian IKU IKA s.d. Triwulan IV</b>	<b>97,57%</b>

- **Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN**

Nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara dan nilai penghematan belanja yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara. Lelang merupakan salah satu ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara berdasarkan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 rentang Kementerian Keuangan.

Nilai manfaat ekonomi pada lingkup pejabat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lelang diperoleh dari:

- Bea lelang Jafung Pelelang;
- Biaya permohonan lelang Jafung Pelelang;
- Penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi Jafung Pelelang
- Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang Jafung Pelelang

Adapun realisasi deviasi data PNBP fungsional DJKN pada tahun 2024 sebesar 0% dari target sebesar 10%.



Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penopang dan memwadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

**Sasaran  
Strategis X**

**Komunikasi  
Publik yang  
Efektif**

Informasi Publik adalah Informasi yang sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik. Waktu ketepatan penyampaian Pemberitahuan Tertulis kepada Pemohon Informasi Publik dihitung sejak permintaan informasi publik diterima oleh PPID Tingkat I. Dalam hal permohonan ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan dan informasi yang diminta terkait PPID Tingkat I, maka PPID Kemenkeu wajib menyampaikan permohonan tersebut kepada PPID Tingkat I paling lambat 2 hari kerja setelah permintaan informasi dinyatakan lengkap melalui nota dinas dan/atau email, selanjutnya PPID Tingkat I wajib menyampaikan informasi kepada PPID Kementerian Keuangan melalui nota dinas dan/atau email paling lambat 13 hari kerja sejak diterimanya nota dinas dan/atau email permohonan dari PPID Kemenkeu. Pemohon dapat menyampaikan permintaan informasi melalui email, surat, telepon, dan aplikasi e-ppid.

Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) berhasil mencapai nilai 100 (120%) dari target sebesar 80 (100%)



Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria zona integritas - wilayah bebas korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik.

Kegiatan penilaian efektivitas UKI memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni:

1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi,
2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE),
3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA),
4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP),
5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS),
6. Penyusunan Profil Pegawai,
7. Penyusunan Simpulan dan LPPI,
8. Jumlah Pengaduan Masyarakat,
9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI
10. Kepuasan Stakeholders, dan
11. Hasil Survei Penilaian Integritas.

Adapun realisasi Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada tahun 2024 sebesar 97.73(119,18%) dari target sebesar 82(100%).

Sedangkan realisasi Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM pada tahun 2024 sebesar 100% dari target sebesar 120%.

**Sasaran  
Strategis XI**

**Pengawasan  
dan  
Pengendalian  
Internal yang  
Bernilai  
Tambah**

## B. REALISASI ANGGARAN

Dana yang dianggarkan dalam DIPA KPKNL Lahat Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-015.09.2.506126/2024 Tanggal 25 November 2023. adalah sebesar Rp 7.950.320.00 dengan realisasi sebesar Rp7.647.563.334 atau dengan persentase realisasi atas anggaran sebesar 96,32 %.

Adapun realisasi anggaran 2024 tersebut rinciannya adalah sebagai berikut:

### 1. Belanja Modal

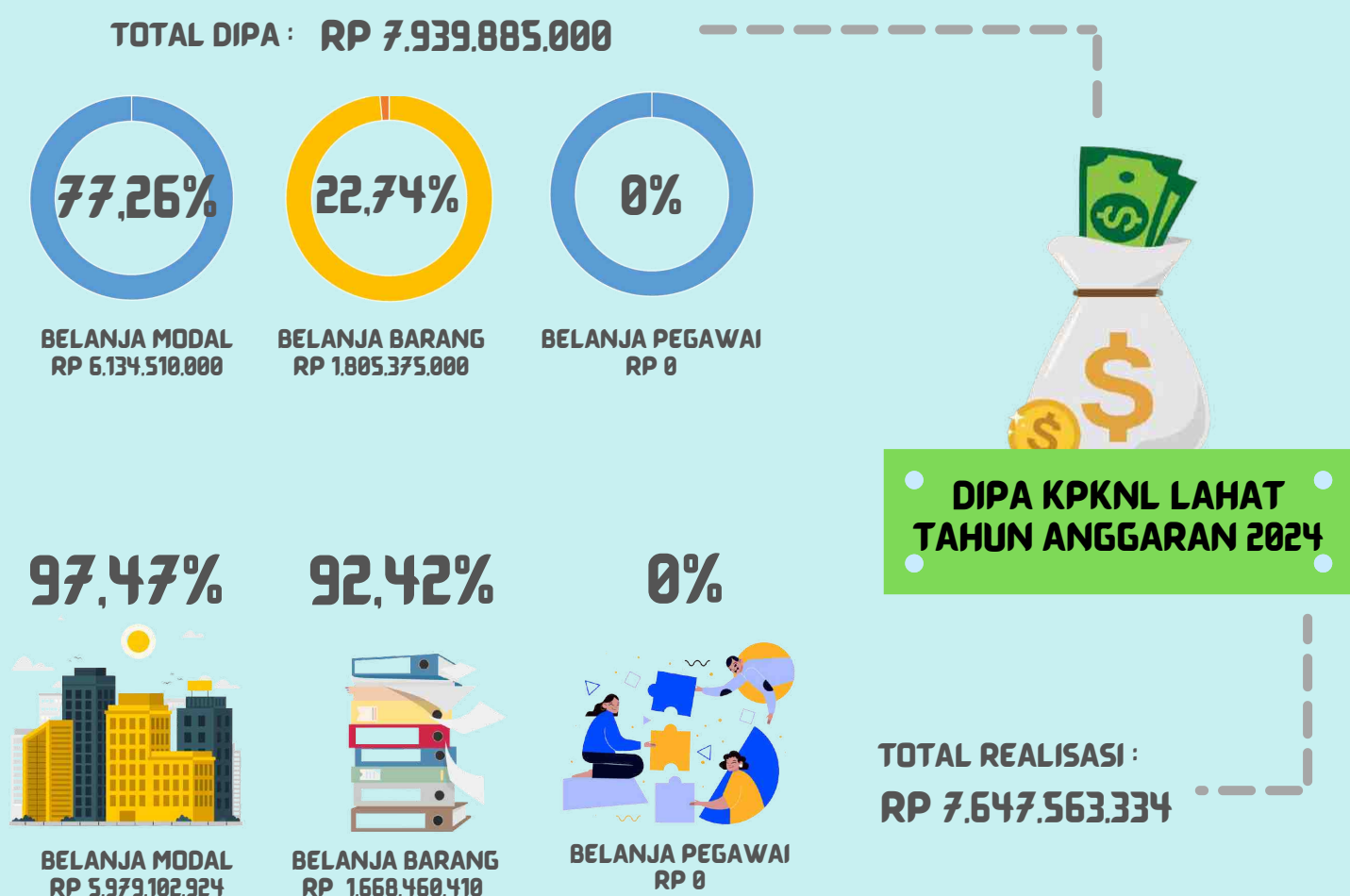
Dana yang dianggarkan untuk belanja modal pada tahun 2024 adalah sebesar Rp6.134.510.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.979.102.924,00 (97,47%)

### 2. Belanja Barang

Dana yang dianggarkan untuk belanja barang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.805.375.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.668.460.410,00 atau sebesar 92,42%.

### 3. Belanja Pegawai

Dana yang dianggarkan untuk belanja pegawai pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 0,00 dengan realisasi sebesar 100%.



---

Selama tahun 2024 KPKNL Lahat telah mendapatkan beberapa penghargaan (*achievement*) antara lain sebagai berikut:

- KPKNL Penyampaian Salinan Risalah Lelang Tercepat, dan
- KPKNL dengan Kinerja Terbaik di Bidang Penilaian.

**C.  
DATA DAN  
NARASI  
KINERJA  
LAINNYA**

Piagam dan sertifikat di atas menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari LAKIN KPKNL Lahat Tahun Anggaran 2024.



# PENUTUP



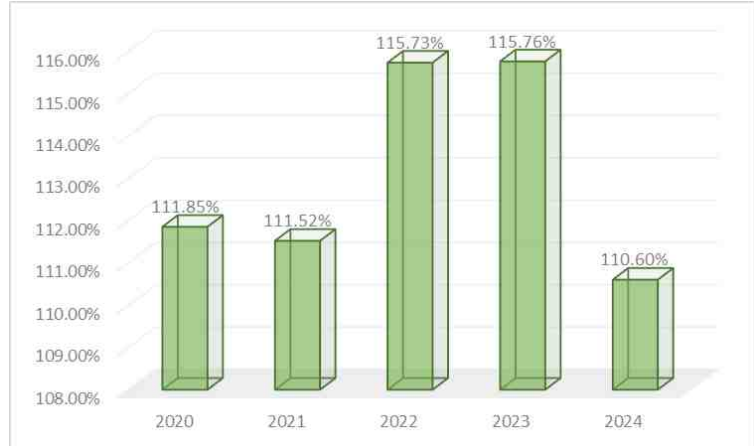
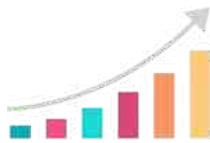
The background features a repeating pattern of chemical structures, including benzene rings and other molecular frameworks, in shades of yellow and grey. At the bottom, there are several horizontal wavy lines in blue and white, transitioning into a solid dark blue area at the very bottom.

# BAB 4

## A. SIMPULAN

Secara umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat telah melaksanakan kinerja selama periode Tahun Anggaran 2024 dengan sangat baik. Seluruh target atas 11 (sebelas) Sasaran Strategis dengan total 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Kontrak Kinerja *Kemenkeu Three*. KPKNL Lahat Tahun 2024 dapat tercapai dengan sempurna. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang berasal dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada awal tahun anggaran tercapai sebesar 110,60% dari nilai maksimal 120%.

### NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) KPKNL LAHAT 2020 - 2024



NKO pada tahun anggaran 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan NKO pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan tidak tercapainya target PNPB dan terdapatnya anggaran pembangunan gedung baru.

Sementara itu, total capaian serapan anggaran sampai dengan Tahun 2024 adalah Rp7.647.563.334,00 dari anggaran sebesar Rp7.939.885.000,00 atau terealisasi sebesar 96,32%.



### ANGGARAN & REALISASI KPKNL LAHAT TAHUN 2024

**96,32%**



## KENDALA

Dalam perjalanannya, KPKNL Lahat menemukan beberapa kesulitan dan kendala ketika melaksanakan tugas. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Lahat, pegawai KPKNL Lahat di tahun 2023 berjumlah 22 (dua puluh dua) orang dimana 2 (dua) pegawai berstatus tugas belajar dengan sebaran wilayah kerja 8 (delapan) kabupaten/kota.
2. Masih rendahnya minat masyarakat dengan proses jual beli secara lelang yang mengakibatkan jumlah barang yang laku di wilayah KPKNL Lahat masih rendah, terutama untuk lelang eksekusi hak tanggungan.
3. Banyaknya lelang yang diestimasikan akan laku menjadi batal karena adanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak debitur.
4. Kultur budaya dimana biasanya orang enggan membeli barang lelang dikarenakan masih terikat hubungan kekerabatan, terutama pada Lelang Eksekusi Hak Tanggungan serta adanya anggapan bahwa barang lelang adalah barang bermasalah.
5. Masih rendahnya tingkat pemahaman satuan kerja terhadap peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang juga disebabkan oleh banyaknya peraturan/ketentuan yang baru menyebabkan masih adanya perbedaan pemahaman dari stakeholder dalam menafsirkan peraturan terkait tugas dan fungsi KPKNL;
6. Cukup banyak satuan kerja dari *stakeholder* yang belum mampu memberdayakan secara maksimal teknologi informasi;
7. Penyampaian dokumen oleh *stakeholder* yang tidak lengkap sehingga menghambat layanan unggulan;
8. Wilayah kerja KPKNL Lahat yang luas menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas;

## B. SARAN

Saran secara umum untuk kinerja KPKNL Lahat adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja bagi pejabat dan pegawai di KPKNL Lahat agar *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam pemenuhan target capaian, saat ini KPKNL Lahat lebih fokus untuk menetapkan dan menerapkan strategi-strategi baru.

Adapun saran agar semakin dapat meningkatkan kinerja KPKNL Lahat adalah dengan menetapkan strategi yang dapat diimplementasikan melalui kerja keras dan kerja sama secara terpadu dari seluruh pegawai KPKNL, antara lain melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu layanan menuju pelayanan prima dan profesional kepada *stakeholder* dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan utilisasi Kekayaan Negara;
2. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, mengutilisasi Kekayaan Negara dan melakukan sertifikasi BMN;
3. Terus melakukan pembinaan dan bimbingan teknis mengenai penatausahaan dan pengelolaan BMN;
4. Melakukan program pendataan, verifikasi dan sertifikasi aset BMN berupa tanah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional;
5. Meningkatkan penggalan potensi lelang, utamanya lelang Barang Milik Daerah (BMD)
6. Menyelenggarakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada *stakeholder* dalam rangka peningkatan pemahaman atas peraturan terkait seluruh tugas dan fungsi KPKNL;
7. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah, Kantor Pusat dan unit kerja eksternal baik instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah;
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terkait pengelolaan manajemen kinerja dan penerapan mitigasi risiko serta kepatuhan internal;
9. Mengoptimalkan kinerja pegawai melalui kegoatan yang bersifat lintas unit;
10. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan menugaskan para pegawai untuk mengikuti berbagai diklat agar menjadi pegawai multi talenta;
11. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, utilisasi Kekayaan Negara dan sertifikasi BMN.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat Tahun Anggaran 2024 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku. Kami berharap LAKIN ini dapat memberikan informasi secara transparan dan menyeluruh kepada seluruh pihak terkait tugas dan fungsi KPKNL Lahat.

Selanjutnya, LAKIN ini semoga dapat digunakan untuk merespon setiap perkembangan tuntutan *stakeholder* serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan di tahun-tahun berikutnya.

**Lahat, 20 Januari 2025**  
**Kepala Kantor**

**Muh. Tajus Syarifin**



# LAMPIRAN

PEJABAT PENGAWAS



NOMOR: PK-03.01/WKN.04/2024  
 KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA  
 DAN LELANG LAHAT  
 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
 SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG  
 KEMENTERIAN KEUANGAN  
 TAHUN 2024



# Peta Strategi

## Sasaran Strategis dan IKU KPKNL Lahat Tahun 2024

**VISI DJKN**

Menjadi Penyelenggara Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan, Menegri Penyelenggara Kekayaan Negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang mandiri, tangguh, inovatif, dan berkeadilan, serta untuk mencapai target Sustainable Development Goals.

**Stakeholder**

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akademi 1 (mastery) Sistem untuk Menwujudkan Perekonomian yang Mandiri, Tangguh, Inovatif, dan Berkeadilan.

IKU: Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang  
 IKU: Efisiensi Anggaran

**Customer**

2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Menunjang Maksimal Pengguna Jasa

IKU: Efisiensi dan Kualitas Pelayanan, Meningkatkan Jumlah dan Nilai Lelang (Lotus)  
 IKU: Efisiensi dan Kualitas Pelayanan, Meningkatkan Jumlah dan Nilai Lelang (Lotus)

3. Pengelolaan Pungut Negara dan Lelang yang Optimal

IKU: Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan  
 IKU: Peningkatan Pencaharian dan Kualitas Pelayanan Pungut Negara

4. Layanan Perikem yang Agile, Efektif dan Efisien

IKU: Efisiensi dan Kualitas Pelayanan, Meningkatkan Jumlah dan Nilai Lelang (Lotus)

**Internal Process**

5. Penempatan Tim Kerja Eksternal Kekayaan Negara yang Ideal

IKU: Peningkatan Jumlah dan Kualitas Tim Kerja Eksternal Kekayaan Negara  
 IKU: Peningkatan Jumlah dan Kualitas Tim Kerja Eksternal Kekayaan Negara  
 IKU: Efisiensi dan Kualitas Pelayanan, Meningkatkan Jumlah dan Nilai Lelang (Lotus)

6. Penempatan Tim Kerja Pungut Negara dan Lelang yang Produktif

IKU: Peningkatan Jumlah dan Kualitas Tim Kerja Pungut Negara  
 IKU: Peningkatan Jumlah dan Kualitas Tim Kerja Pungut Negara

7. Pelaksanaan Perikem yang Akuntabel dan Profesional

IKU: Peningkatan Jumlah dan Kualitas Tim Kerja Pungut Negara

**Energy & Drive**

8. Peningkatan Organisasi dan SDM yang Adaptif

IKU: Peningkatan Jumlah dan Kualitas Tim Kerja Eksternal Kekayaan Negara  
 IKU: Peningkatan Jumlah dan Kualitas Tim Kerja Eksternal Kekayaan Negara

9. Peningkatan Kualitas yang Akuntabel

IKU: Peningkatan Jumlah dan Kualitas Tim Kerja Eksternal Kekayaan Negara  
 IKU: Peningkatan Jumlah dan Kualitas Tim Kerja Eksternal Kekayaan Negara

10. Komunikasi Publik yang Efektif

IKU: Peningkatan Jumlah dan Kualitas Tim Kerja Eksternal Kekayaan Negara  
 IKU: Peningkatan Jumlah dan Kualitas Tim Kerja Eksternal Kekayaan Negara

11. Peningkatan dan Pengembangan Internal yang Berkelanjutan

IKU: Peningkatan Jumlah dan Kualitas Tim Kerja Eksternal Kekayaan Negara  
 IKU: Peningkatan Jumlah dan Kualitas Tim Kerja Eksternal Kekayaan Negara

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
LAHAT  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (Rp2.8M)
		1b-CP Indeks Integritas	89,17
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	71,5%
		2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%
3.	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal	3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (Rp10M)
		3b-CP Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100% (Rp79Jt)
4.	Layanan Penilaian yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
		5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		5c-N Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN <i>Idle</i>	100

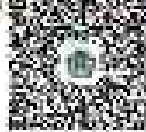
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	25% (2 BKPN)
		6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	89%
7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	8a-CP	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%
		8b-CP	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
9.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	100
		9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%
10.	Komunikasi Publik yang Efektif	10a-CP	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80



No.	Sistem Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11.	Penguasaan dan Pengendalian Internal yang Berhasil Tambah	11a-N Indeks Efektivitas Unit Kompetensi Internal (UEI)	82
		11b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pambangunan ZI-WEK/WEBM	100

Program/Kegiatan Tahun 2024		Anggaran
Total Alokasi KPNAL Lahir (506126)	Rp	8.858.558.000
Program :		
Pengelolaan Pertanggungjawaban, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	290.155.000
Kegiatan :		
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	12.303.000
2. Pengelolaan Asas	Rp	277.787.000
Program :		
Dukungan Manajemen	Rp	8.368.408.000
Kegiatan :		
1. Legislasi dan Litbang	Rp	16.536.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	8.229.948.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	11.842.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Penguasaan Internal	Rp	10.384.000

Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera  
Selatan, Jambi



Ditandatangani secara Elektronik  
Ferdinan Langkeng

Palembang, 02 September 2024

Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Palembang



Ditandatangani secara Elektronik  
Muh. Tajas Syarifin



**PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN \_\_\_\_\_ PERIODE PENILAIAN: 02 September s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Muh. Tajus Syaifin, S.S.T., M.M.	NAMA	Ferdinan Lengkon	
NIP	198508152007101002	NIP	196612121991031001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Penata Tingkat I, III/d	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	
JABATAN	Kepala Kantor	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perencanaan yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perencanaan yang Produktif, Kompetitif, Inklusif,	Indeks Integritas	89,17	Penerima Layanan

	kekayaan negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)			
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	71,5%	Penerima Layanan
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86%	Penerima Layanan
5.	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	Penerima Layanan
6.	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	Penerima Layanan
7.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	Penerima Layanan

8.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipkalkan	100%	Proses Bisnis
9.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis
10.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	100	Proses Bisnis
11.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	25%	Proses Bisnis
12.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase Produktivitas Lelang	89%	Proses Bisnis
13.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	Proses Bisnis



	Bangka Belitung)			
14.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%	Penguatan Internal atau Anggaran
15.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	Penguatan Internal atau Anggaran
16.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Indeks Kinerja Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
17.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase Deviasi Data PNB P Fungsional DJKN	10%	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Komunikasi Publik yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bermilai Tambah (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	Penguatan Internal atau Anggaran



20. Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Berilai Tambah (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-W/BK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
---	---	-----	----------------------------------

**B. TAMBAHAN**

**PERILAKUKERJA**

1. Berorientasi pelayanan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2. Akuntabel	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3. Kompeten	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.



**PERILAKU KERJA**

4	<p><b>Harmonis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p><b>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</b></p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	<p><b>Loyal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p><b>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</b></p> <p>Menjunjung dan menaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	<p><b>Adaptif</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p><b>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</b></p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	<p><b>Kalaboratif</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p><b>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</b></p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Pegawai yang Dinilai,

Palembang, 02 September 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani Secara Elektronik  
Muh. Tajus Syarifin

Ditandatangani Secara Elektronik  
Ferdinan Lengkong

**NILAI KINERJA ORGANISASI  
KPKNL LAHAT  
PERIODE s.d. Triwulan IV (Q4) 2024**

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Validitas / Kendali	Target	Realisasi	Bobot Awal IKU	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Capaian Max (120%)	Keterangan
<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>		<b>30%</b>				<b>29,26%</b>			
<b>1 Pengelolaan Keuangan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Memajukan Perencanaan yang Produktif</b>									
1a-CF	Persentase Realisasi Penyerapan Negara dari Pengelolaan Keuangan Negara dan Lelang	F/M	100%	89,28%	14%	42%	89,28%	89,23%	Kuning
1b-CF	Indeks Integritas	F/L	88,17	82,44	19%	58%	103,67%	103,67%	Hijau
<b>Customer Perspective (20%)</b>		<b>20%</b>				<b>22,67%</b>			
<b>2 Pengelolaan Keuangan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b>									
2a-CF	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMH dengan SBSE	F/L	71,50%	82,41%	19%	50%	115,28%	115,26%	Hijau
2b-CF	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMH	F/L	86,50%	86,48%	19%	50%	111,48%	111,48%	Hijau
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>		<b>25%</b>				<b>29,13%</b>			
<b>3 Pengelolaan Pintang Negara dan Lelang yang Optimal</b>									
3a-CF	Persentase Realisasi Pokok Lelang	F/M	100%	148,21%	14%	50%	148,21%	120,00%	Hijau
3b-CF	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	F/M	100%	281,72%	14%	50%	281,72%	120,00%	Hijau
<b>4 Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien</b>									
4a-CF	Indeks Ketepatan Waktu Penyelidikan Layanan Penilaian	E/M	75	106,82	21%	100%	142,43%	120,00%	Hijau
<b>5 Penerapan Tata Kelola Keuangan Negara yang Efektif</b>									
5a-CF	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Diserapikatkan	F/L	100%	100,16%	19%	40%	100,16%	100,16%	Hijau
5b-CF	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	F/M	100%	126,70%	14%	30%	126,70%	120,00%	Hijau
5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idia	F/M	100	100	14%	30%	100%	100,00%	Hijau
<b>6 Penerapan Tata Kelola Pintang Negara dan Lelang yang Produktif</b>									
6a-CF	Persentase Saldo Barkas Kasus Piutang Negara (BEPN)	F/M	25%	0,00%	14%	50%	133,38%	120,00%	Hijau
6b-CF	Persentase Produktivitas Lelang	F/M	89%	120%	14%	50%	134,88%	120,00%	Hijau
<b>Learning &amp; Growth Perspective (25%)</b>		<b>25%</b>				<b>29,54%</b>			
<b>7 Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>									
7a-CF	Persentase Deviasi Ketertarikan Hasil Penilaian	F/M	16%	0,01%	14%	100%	199,94%	120,00%	Hijau
<b>8 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif</b>									
8a-CF	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	F/M	90%	119%	14%	50%	132,22%	120,00%	Hijau
8b-CF	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	F/M	85	97,32	14%	50%	114,49%	114,49%	Hijau
<b>9 Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel</b>									
9a-CF	Indeks Kinerja Anggaran (IKA)	F/M	100	120	14%	50%	120,00%	120,00%	Hijau
9b-CF	Persentase Deviasi Data FNSP Fungsional DJKN	F/M	10%	0%	14%	50%	200,00%	120,00%	Hijau
<b>10 Komunikasi Publik yang Efektif</b>									
10a-CP	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PIP)	F/M	80	100	14%	100%	125,00%	120,00%	Hijau
<b>11 Penguasaan dan Peningkatan Internal yang Bernilai Tambah</b>									
11a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	E/M	82	97,78	21%	60%	119,18%	119,18%	Hijau
11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WEBM	F/M	100%	105%	14%	40%	105,00%	105,00%	Hijau
<b>NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)</b>								<b>110,60%</b>	<b>Hijau</b>



Dipertanggungjawabkan secara elektronik  
Muh. Tajus Syarifin





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANWIL DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG

# PIAGAM PENGHARGAAN DIBERIKAN KEPADA

## KPKNL LAHAT

sebagai KPKNL dengan Penyampaian Salinan Risalah Lelang Tercepat

PALEMBANG, 31 OKTOBER 2024  
KEPALA KANWIL DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI,  
DAN BANGKA BELITUNG



Ditandatangani secara elektronik  
**FERDINAN LENGKONG**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANWIL DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG

# PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

# KPKNL LAHAT

sebagai KPKNL dengan Kinerja Terbaik di Bidang Penilaian

PALEMBANG, 31 OKTOBER 2024  
KEPALA KANWIL DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI,  
DAN BANGKA BELITUNG



Ditandatangani secara elektronik  
**FERDINAN LENGKONG**

